

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Agung Edy Wibowo, 2021. *Penelitian Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah*. Cirebon: Insania.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Elisabeth Ayustina Putri Korassa Sonabi, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Ida Bagus Agung Putra Santika, 2022. *Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Menjalankan Jabatan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Herlien Budiono, 2017. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- H. R. Daeng Naja, 2012. *Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan)*. Yogyakarta: Pustaka.
- Habib Adjie, 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Habib Adjie, 2018. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Habib Adjie, 2020. *Pemahaman Awal (Komparisi-Premisse), Isi dan Akhir Akta Notaris*. Surabaya: Narotama University Press.
- Hans Kelsen dan Somardi (Penerjemah), 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif- Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

- J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 1960. *Peladjaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Juni Sjafrien Jahja, 2013. *Prinsip Kehati-Hatian Memberantas Manajemen Koruptif pada Pemerintahan & Korporasi*. Jakarta: Visimedia.
- M. Luthfan Hadi Darus, 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- M. Philipus Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Salim H. S., 2016. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sukarmi, 2008. *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Bandung: Pusaka Sutra.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2009. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian kredit di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

B. Jurnal

- Andi Maulana dan Ngadino, 2022, “Objektivitas Majelis Pengawas Daerah Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Notaris”. Semarang: Notarius.
- Azwardi dan Arum Meysita, 2022. “Prinsip Kehati-Hatian dalam pembuatan Akta Otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)”. Jakarta: Jurnal Kewarganegaraan.
- Daniar Ramadhan dan Ngadino, “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang Berhubungan dengan pertanahan”. Semarang: Notarius.
- Dea Derika, 2020. “Fungsi Notaris dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan dengan Asas Kehati-hatian”. Bandung: Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum.

- Dheanda Cahirunnisa, 2022. "Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris". Padang: Sakato Law Journal.
- Desela Sahra Annisa Rangkuti dan Fully Handayani Ridwan, 2022. "Pelaksanaan Jabatan Notaris yang Mendapat Kewenangan dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik". Bali: Jurnal Kerta Semaya.
- Fadhila Adjamara, Tresno Novianto, dan Jadmiko Anom Husodo, 2023. "*Preceeding of Conference on Law and Social Studies* Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang Dibuat Oleh Notaris dalam Perkembangan Hukum Perdata Indonesia". Madiun: FH Universitas PGRI Madiun.
- Grace Novika Rasta, 2015. "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Yang Diperbuatnya dalam Perkara Pidana (Studi di Pematangsiantar)".
- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik". Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Imas Rosyani, 2019. "Penerapan Strict Liability dan Asas Kehati-Hatian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Analisis Yudiris Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 26/Pdt/2017/Plk)". Bandung: Repository Universitas Pasundan.
- Jozan Adolf, Widhi Handoko, dan Muhamad Azhar, 2020. "Eksistensi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan". Semarang: Notarius.
- Julista Mustamu, 2014. "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi)". Ambon: Jurnal Sasi.
- Lalu Husni dan Salim, H. S., 2021. "Analisis Hukum Terhadap Substansi Akta Autentik: Sebagai Instrumen di dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta-Akta Perjanjian". Mataram: Jurnal Risalah Kenotariatan.

- M. Syahrul Borman, 2019. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris”. Surabaya: Jurnal Hukum dan Kenotariatan.
- Muhammad Bachruddin Jusuf dan Adara Khalfani Mazin, 2023. “Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum di Indonesia”. Pasundan: FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia).
- Nadya Nur Ivany, Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, dan Zachry Vandawati Chumaida, 2023. “Kedudukan Akta Notaris yang Penghadapnya Memiliki Hubungan Keluarga dengan Notaris”. Surabaya: Perspektif.
- Nelly Juwita, 2013. “Kesalahan Ketik dalam Minuta Akta Notaris yang Salinannya Telah Dikeluarkan”. Surabaya: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya.
- Ni Nyoman Ayu Ratih Padnyani, 2020. “Tanggung Jawab Hukum dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional”. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sharon Eunice, 2019. “Kedudukan Akta di Bawah Tangan yang Membatalkan Akta Notariil”. Surabaya: Jurnal *Sapientia et Virtus*.

C. Tesis

- Ayu Utami, 2023. “Analisis Hukum Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Notaris dalam pembuatan Akta Autentik”. Makassar: Repository Universitas Muslim Indonesia.
- Zulkarnaen Sam Dwi, 2008. “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Melaksanakan Jabatannya”. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ona Saputri, 2023. “Penerapan Asas Kehati-Hatian dan Asas Profesionalitas Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik”. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.